

FORUM

KESEJAHTERAAN SOSIAL

- **DESENTRALISASI DAN KERJASAMA PEMERINTAH - SWASTA**
 - **GAGASAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL DALAM KONSEPSI NEGARA KESEJAHTERAAN DI INDONESIA**
 - **STUDI IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DASAR DI KOTA MAGELANG**
 - **KEBERLANJUTAN : TANTANGAN PROGRAM SOCIAL MARKETING UNTUK PERUBAHAN SOSIAL**
 - **MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA GUNA MENUJU KELUARGA SEJAHTERA**
 - **KONSUMSI SEBAGAI PENANDA KESEJAHTERAAN DAN STRATIFIKASI SOSIAL (Dalam Bingkai Pemikiran Jean Baudrillard)**
 - **PENGARUH IKATAN FINANSIAL, SOSIAL DAN STRUKTURAL TERHADAP LOYALITAS NASABAH DIMEDIASI VARIABEL CORPORATE IMAGE (Studi Kasus Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang UNDIP Semarang)**
 - **PERAN KOMUNIKASI DALAM DEMOKRATISASI**
 - **PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN IMAGE TERHADAP PERILAKU PASCAPEMBELIAN DENGAN KEPUASAN SEBAGAI INTERVENING VARIABEL: MELALUI PENDEKATAN TEORI PERTUKARAN (Social Exchange Theory) DAN TEORI PILIHAN RASIONAL (Rational Choice Theory)**
 - **MENCARI KESEJAHTERAAN MELALUI RITUAL RUWATAN MASSAL**
-

Pengantar	i
Priyatno Harsastro	
Desentralisasi dan kerjasama Pemerintah - Swasta	1
Yuwanto	
Gagasan Pengaduan Konstitusional dalam Konsepsi Negara Kesejahteraan Di Indonesia	7
Aloysius Rengga	
Studi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Dasar di Kota Magelang.....	12
Djoko Setyabudi	
Keberlanjutan : Tantangan Program Social Marketing untuk Perubahan Sosial.....	21
Rodhiyah	
Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera.....	28
Nurist Surayya Ulfa	
Konsumsi Sebagai Penanda Kesejahteraan dan Stratifikasi Sosial	34
Naili Farida	
Pengaruh Ikatan Finansial, Sosial dan Struktural Terhadap Loyalitas Nasabah Dimediasi Variabel Corporate Image (Studi Kasus Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang UNDIP Semarang)	42
Triyono Lukmantoro	
Peran Komunikasi dalam Demokratisasi	51
Ari Pradhanawati	
Pengaruh Kualitas Layanan dan Image Terhadap Perilaku Pascapembelian dengan Kepuasan Sebagai Intervening Variabel : Melalui Pendekatan Teori Pertukaran (Social Exchange Theory) dan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)	57
Muhammad Bayu Widagdo	
Mencari Kesejahteraan Melalui Ritual Ruwatan Masal	68

Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro - Terbit Pertama kali bulan Februari 1972 ; **Penanggung Jawab** : Drs. Agus Hermani, DS, MM - Drs. Herbasuki Nurcahyanto, MT - Drs. Handojo Djoko W, M.Si - Drs. Wahyu Hidayat, M.Si - Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D ; **Ketua Penyunting** : Drs. Suwanto Adhi, SU ; **Sekretaris Penyunting** : Agus Naryoso, S.Sos, M.Si; **Penyunting Pelaksana** : Dr. Ida Hayu Dwimawanti - Drs. Tri Cahyo Utomo, MA - Dr. Turnomo Rahardjo - Dra. Rodhiyah, SU - Nurul Hasfi, MA; **Penyunting Ahli** : Prof. Dr. Y. Warella, MPA (Undip) - Prof. Dr. Sudharto PH, MES (Undip) - Dr. Ari Pradhanawati, MS (Undip) - Dr. Peter Suwarno (USA) - **Tata Usaha** : Tri Wardoyo, S.E - Staf Tata Usaha Fisip - Undip.

Alamat :

MPIIS Forum Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Sudharto, SH. No. 1 Kampus Tembalang Semarang
E-mail : forumfisip@gmail.com

Sumbangan Tulisan :

Redaksi menerima sumbangan tulisan/foto yang relevan dengan tema atau topik pada setiap penerbitan, Setiap foto haruslah disertai dengan foto copy identitas yang jelas. Setiap artikel yang dikirimkan menjadi hak sepenuhnya dari redaksi untuk mengedit dan menampilkannya

PERAN KOMUNIKASI DALAM DEMOKRATISASI

Oleh : Triyono Lukmantoro

Communication has a vital role in the processes of democratization. But, on the other perspective, democracy also determines the way of communication. There are three types of relations between communication and democracy: minimalist democracy, radical democracy, and deliberative democracy. We have to take the choice what kind of democracy that we think it is the best for us.

Keywords: communication, democratization, types of democracy.

PENDAHULUAN

Apakah relevansi antara komunikasi dengan demokrasi? Apakah komunikasi memiliki peran yang menentukan dalam proses demokratisasi? Apakah komunikasi yang terbuka menjadikan proses demokratisasi semakin cepat dan baik? Atau, justru sebaliknya, komunikasi yang terbuka mengakibatkan demokratisasi berdampak buruk bagi negara dan masyarakat sendiri? Dengan demikian, apakah komunikasi sebaiknya dikembalikan dalam rezim yang serba tertutup dan otoriter? Dan, pertanyaan paling penting yang pantas dijawab adalah: Apakah komunikasi mendeterminasikan arah perjalanan demokrasi atau demokrasi yang justru mendeterminasikan komunikasi?

Banyak pertanyaan yang dapat dikemukakan mengenai kaitan komunikasi dengan demokrasi. Namun, satu hal yang sudah pasti bahwa terdapat pengandaian komunikasi menentukan arah demokrasi. Hal ini disebabkan bahwa komunikasi yang berjalan secara terbuka dapat mempercepat proses demokratisasi. Komunikasi dalam domain persoalan ini dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator (*sender*) kepada komunikan (*receiver*). Persoalan yang dianggap sangat penting dari definisi komunikasi ini ialah bagaimana pengirim pesan mengemas serta mengirimkan pesan (*encode*) dan bagaimana pihak penerima pesan memahaminya (*decode*). Efisiensi (kehematan) dan akurasi (ketepatan) adalah tujuan yang hendak dicapai dalam mazhab (aliran pemikiran) ini (Fiske, 1990).

Masalah selanjutnya yang dapat ditelusuri adalah siapakah yang berkedudukan sebagai komunikator dan komunikan dalam ranah demokrasi? Tentu saja, jawaban terhadap hal itu sangat tergantung pada model demokrasi yang dijalankan. Apabila demokrasi yang diterapkan lebih banyak memberikan peluang bagi para pemimpin politik (pejabat negara atau pemimpin

partai politik) untuk bersikap instruktif, maka yang bertindak sebagai komunikator adalah kalangan elite politik belaka. Dalam relasi yang demikian ini, rakyat tidak lebih berperan sebagai komunikan yang pasif. Rakyat sekadar menjadi pendengar yang hanya boleh menerima pesan-pesan politik, namun tidak mampu menyampaikan umpan balik (*feedback*). Itulah corak komunikasi yang bersifat linear, seperti layaknya garis lurus yang memberikan perintah maupun petunjuk, tanpa boleh disanggah oleh para penerima pesan. Komunikasi dianggap berjalan dengan baik ketika pesan-pesan yang dikemukakan kalangan elite politik mampu dicerna secara jelas atau tanpa distorsi oleh masyarakat kebanyakan. Fenomena ini, ironisnya, dapat terjadi dalam sistem politik yang mengklaim demokrasi.

Hal paling ideal yang seharusnya dijalankan adalah komunikasi tidak bersifat linear, melainkan sirkular (melingkar). Artinya adalah ketika komunikator bertindak menyampaikan pesan, maka rakyat memiliki peluang yang sama untuk memberikan respon. Dalam ranah komunikasi semacam ini, kedudukan komunikator maupun komunikan dapat saling bergantian. Posisi komunikator tidak semata-mata dipegang oleh para elite politik, sebaliknya rakyat pun tidak hanya berkedudukan sebagai pihak komunikan. Rakyat mampu berkedudukan sebagai komunikator ketika mereka dapat menyampaikan tanggapan dalam bentuk apa pun, misalnya pujian, kritik, maupun saran, kepada kalangan elite politik yang berposisi sebagai pihak komunikan. Inilah komunikasi yang menunjukkan sifat kesederajatan. Konsep komunikator yang serba berkuasa (*powerful*) atau komunikan yang sangat tidak berdaya (*powerless*) menjadi hilang karena kedua pihak memiliki kedudukan yang setara sebagai pihak-pihak yang sedang terlibat (partisipan) dalam komunikasi.

Tentu saja, model komunikasi yang mengandaikan kehadiran komunikator dan komunikan yang kemudian melebur menjadi

kalangan partisipan semacam ini hanya mungkin terjadi dalam sistem demokrasi yang sederhana atau demokrasi langsung (bukan demokrasi perwakilan). Atau, komunikasi sirkular ini bisa terjadi dalam pelaksanaan demokrasi pada tataran sosial yang tidak kompleks, seperti dalam pelaksanaan musyawarah di desa atau pada ruang lingkup komunitas yang jumlah pesertanya sangat kecil (terbatas). Dalam ranah seperti ini, seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan komunikasi secara tatap muka (*face-to-face*). Di situlah dialog diharapkan bisa terjadi secara baik, bukan dua monolog yang berjalan sendiri-sendiri.

Hanya saja harus ditegaskan bahwa apa yang disebut sebagai dialog yang baik mengharuskan terjalannya pembicaraan antara Aku-Engkau (*I-Thou*) dan bukan Aku-Itu (*I-It*), sebagaimana dikemukakan oleh filosof Martin Buber (1878-1965). Dialog ini tidak menempatkan orang lain sebagai benda yang dapat dimanfaatkan sesuai selera si Aku, namun melainkan bahwa orang lain diposisikan dalam kategori yang penuh penghormatan. Aku dan orang lain terlibat dalam perjumpaan yang konkret. Tidak ada kualifikasi maupun obyektivikasi terhadap pihak lain. Apabila kualifikasi (penentuan aneka persyaratan) dan obyektivikasi (menempatkan orang lain sebagai obyek yang dimanfaatkan sesuai agenda si Aku) yang terjadi, maka dialog mengalami kegagalan (Zank, 2007). Dialog seperti ini tidak pantas disebut sebagai komunikasi yang sejati.

PEMBAHASAN

Kompleksitas demokrasi, kerumitan komunikasi

Demokrasi yang terjadi pada saat ini sedemikian kompleks karena melibatkan banyak komponen atau kalangan pemain politik yang berasal dari unsur-unsur negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat sipil (*civil society*). Para pemain politik yang berasal dari unsur negara, misalnya adalah pejabat negara, birokrat, anggota legislatif (para wakil rakyat), para aktivis partai politik, serta badan-badan hukum. Para pemain politik yang muncul dari komponen pasar, misalnya adalah kalangan pengusaha, para jurnalis yang bekerja dalam organisasi media massa, dan kalangan wirausahawan. Sementara itu pemain-pemain politik yang berasal dari unsur masyarakat adalah para aktivis organisasi non-pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat), sivitas akademika perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa), serta kelompok-kelompok masyarakat lain yang mempunyai kemampuan

untuk menghimpun-diri.

Kompleksitas demokrasi, secara otomatis, mengandaikan kerumitan tersendiri dalam komunikasi. Fenomena semacam ini akan mudah dideteksi ketika pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden, dijalankan. Hal ideal dalam demokrasi, terlebih lagi ketika pemilihan umum sedang digulirkan, ialah kalangan kandidat seharusnya menyediakan informasi yang lengkap mengenai diri mereka, ideologi-ideologi (gagasan-gagasan utama) serta program-program politik mereka kepada warga negara. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat mempunyai informasi atau pengetahuan yang mencukupi. Pada situasi semacam ini, media massa memegang peranan yang sedemikian sentral. Media massa diharapkan tidak sekadar memberitakan tentang kontestasi atau kompetisi politik itu sendiri, melainkan juga media harus bisa memberikan informasi yang mendalam tentang aturan-aturan main dan para pemain politik yang sedang terlibat dalam pertarungan meraih jabatan.

Komunikasi menjadi soal krusial bukan saja bagi kaum teoritis demokrasi yang memiliki perhatian terhadap perkembangan wacana (perdebatan) publik dan keadaan demokrasi, melainkan juga bagi pihak-pihak yang bersifat pragmatis (para pengguna komunikasi), yakni partai-partai politik dan kalangan politisi. Bagi pihak-pihak yang termasuk dalam golongan pragmatis ini, komunikasi yang efektif dengan para pemilih, terutama para pemilih yang masih akan mengubah pendiriannya (*swing voters*), merupakan kunci untuk meraih kemenangan. Komunikasi terbaik pasti akan mereka jalankan. Dalam sistem politik yang dimediasikan (artinya secara intensif dan eksesif melibatkan media massa), maka mereka yang mempunyai uang berlimpah mampu membayar bentuk-bentuk komunikasi yang dianggap sangat menguntungkan, misalnya melalui pemasangan iklan di media massa (Young, 2003).

Mesin-mesin pencitraan pun pasti tanpa henti dimainkan. Iklan-iklan politik terus-menerus memenuhi ruang-ruang kesadaran sosial (Lukmantoro, 2008a), bahkan dengan menonjolkan watak narsisisme (cinta diri secara berlebihan) sekalipun (2008b). Seakan-akan para pemain politik tidak lagi merasakan malu untuk "menjual diri" di hadapan masyarakat. Iklan-iklan politik tidak sekadar berperan sebagai topeng politik, melainkan juga bahwa iklan-iklan itu dianggap sebagai pembenar bahwa mekanisme inilah yang harus ditempuh dalam suasana demokrasi yang sedemikian kompetitif. Komunikasi politik bukan lagi diperantari oleh

pemberitaan-pemberitaan media, melainkan komunikasi politik sangat rentan untuk dimanipulasi oleh iklan-iklan politik yang ditayangkan oleh media massa. Bukankah iklan-iklan yang baik, terlebih dalam arena perpolitikan, adalah pesan-pesan komunikasi yang mampu mengelabui? Tentu saja, pertanyaan itu adalah sebetulnya sinisme yang seringkali telah dikemukakan banyak orang.

Bahkan, bukan sekadar persoalan komunikasi melalui iklan-iklan politik itu yang membuka kerentanan manipulatif, sehingga menjadikan demokrasi semakin mengalami kekacauan, melainkan bahwa praktik-praktik politik uang (*money politics*) telah dianggap sebagai mekanisme yang wajar untuk meraih kemenangan. Demokrasi yang telah basah kuyup dengan permainan politik uang sesungguhnya juga berakibat pada keterasingan masyarakat dalam proses-proses politik yang cerdas (Lukmantoro, 2009). Uang tidak hanya berkedudukan sebagai alat pertukaran dalam transaksi jual-beli. Uang, dalam perjalanan demokrasi kita, telah menjadi “perkakas komunikatif” yang dianggap lebih real dan memberikan kepastian ketimbang banyak janji palsu yang ditebarkan para politisi. Uang, dengan demikian, merupakan sebetulnya pesan spesifik dalam demokrasi yang sudah terlanjur terperangkap dalam makna-makna doktriner monetisasi. Sekali lagi, ini merupakan pernyataan sinistik yang melihat komunikasi dalam demokrasi bukan lagi sebagai sebuah bentuk aktivitas pertukaran pesan (gagasan atau program), melainkan sebagai pertukaran untuk mendapatkan keuntungan secara cepat tanpa pemikiran yang mendalam. Sinisme yang dikemukakan di sini dimaksudkan untuk melakukan kritik mendasar terhadap praktik-praktik komunikasi yang manipulatif.

Demokrasi—sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat—memang sangat kompleks. Tapi, jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya, ada tiga konsepsi demokrasi yang memiliki keterkaitan dengan komunikasi (Starr dalam Zelizer [ed.], 2008), yaitu:

Pertama, demokrasi minimalis. Dalam konsepsi ini, demokrasi merupakan pengaturan kelembagaan yang menempatkan individu-individu merebut kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan politik dengan teknik melibatkan pertarungan kompetitif melalui hak suara (*vote*) yang dimiliki oleh pihak rakyat. Kriteria kunci demokrasi adalah pemilihan umum kompetitif yang berlangsung secara bebas untuk memenuhi preferensi-preferensi politik kalangan

pemilih dan mendapatkan kalangan pejabat yang bertanggung jawab. Konsepsi demokrasi minimalis ini dideskripsikan sebagai bersifat agregatif, menjalankan pertarungan (*adversarial*), dan mendapatkan kekuatan mayoritas. Teori demokrasi ini menempatkan politik sebagaimana layaknya (beranalogi dengan) pasar, sehingga pertarungan dalam ruang pasar politik pun dilihat sebagai kompetisi di antara kelompok-kelompok elite. Pada pandangan minimalis ini tidak dituntut keterlibatan rakyat secara eksekutif dalam politik. Sebabnya adalah pihak rakyat dianggap sebagai kekuatan yang tidak peduli (masa bodoh) namun berwatak rasional. Para pemilih tidak memberikan perhatian terhadap detail-detail kebijakan publik karena mereka memiliki peluang yang sedikit untuk memengaruhi hasilnya dan mampu memaksimalkan kegunaannya dengan cara tetap mengurus kehidupan pribadi dan pekerjaan mereka sendiri. Pada saat pelaksanaan pemilihan umum, mereka bisa menggunakan nama-nama partai dan membuat keputusan-keputusan memilih yang memuaskan yang merefleksikan preferensi-preferensi mereka.

Pada konsepsi demokrasi minimalis ini, maka komunikasi dipandang sebagai kebebasan berbicara dan kebebasan pers dalam pengertian non-campur tangan oleh pihak negara. Sehingga, dari situlah terjadi kontes politik terbuka yang mendukung pemilihan umum dan mencegah mereka yang masih menjabat untuk mengekalkan kekuasaan mereka. Hal ini berkesesuaian dengan analogi bahwa apabila demokrasi adalah pertarungan kompetitif bagi suara rakyat, maka sistem media yang demokratis dipahami sebagai pertarungan kompetitif yang terjadi pada para pembaca, pendengar, penonton, dan pemakai media massa yang lain, misalnya internet. Para demokrat minimalis tidak terganggu oleh pasar media yang mengarahkan berita-berita penting dan program-program yang berkaitan dengan masalah publik menjadi hiburan. Hal ini adalah cerminan dari pilihan individual dan sikap kemasabodohan namun rasional. Karena para pemilih mendelegasikan keputusan-keputusan kepada para pejabat yang terpilih dalam sistem perwakilan, maka mereka menyerahkan kebijakan publik kepada para ahli (*experts*). Konsentrasi kepemilikan media juga tidak akan mengganggu kalangan penganut demokrasi minimalis ini.

Kedua, demokrasi yang memiliki spektrum bertentangan dengan demokrasi model minimalis. Pada konsepsi ini, demokrasi dipandang sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam permasalahan-permasalahan publik dan distribusi kekuasaan yang sama dalam masyarakat.

Demokrasi ini dikenal sebagai konsepsi yang lebih banyak mengedepankan model radikal, partisipatoris dan demokrasi yang kuat. Para eksponennya melihat konsepsi demokrasi minimalis yang berkarakter agregatif dan kompetitif sebagai sangat terlalu sedikit ideal dan menawarkan model kewargaan yang terlalu pasif. Untuk menciptakan pemerintahan rakyat yang asli (*genuine*), maka seharusnya tercipta lebih dari sekadar kontestasi para elite atas nama rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi tidak direduksi dalam pemilihan umum, namun juga pemilihan-pemilihan pada proses pemerintahan, dan lembaga-lembaga ekonomi dan sosial yang lainnya. Sehingga, ketidaksetaraan politik pun dapat diatasi.

Dalam ranah komunikasi, para demokrat radikal memandang pasar sebagai pengaruh yang mengorupsi yang mendegradasikan diskusi politik dan memperkuat apa yang disebut sebagai hegemoni kultural dari kelas kapitalis. Pada saat sekarang ini hal itu biasanya dicirikan oleh penguasaan atau "monopoli" dari korporasi-korporasi media besar. Jika masyarakat tidak mampu memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan publik karena sistem politik dan sistem media memang gagal melibatkan mereka. Sebagaimana maksim yang dipegang kalangan radikal lama, maka obat untuk penyakit demokrasi adalah lebih mempertinggi demokrasi (komunikasi) itu sendiri.

Ketiga, pandangan antitesis terhadap dua konsepsi demokrasi sebelumnya atau konsepsi hak-hak konstitusional. Menurut pandangan ini, demokrasi adalah corak "pemerintahan dengan cara diskusi" yang menuntut semua pihak yang berkepentingan mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Mekanismenya adalah menawarkan alasan-alasan yang membenarkan posisi-posisi mereka dalam terminologi nilai-nilai yang dapat diterima secara umum. Lebih dari sekadar mengagregasikan preferensi-preferensi rakyat, maka politik demokratis juga sebagai sarana memunculkan dan menitikberatkan argumen-argumen. Selain itu, konsepsi demokrasi ini juga tidak sudi terjebak dalam pertarungan di antara alite-elite politik, melainkan bahwa demokrasi ini menuntut saling menghormati di antara mereka yang saling berposisi dan selalu berupaya untuk mencari basis kerja sama (kooperasi) yang mentransendensikan (mengatasi) ketidaksepakatan politik dan moral yang bercorak partikular (sempit).

Bisa dikatakan inilah model demokrasi deliberatif yang memiliki implikasi langsung terhadap komunikasi. Karena kualitas diskusi

publik merupakan persoalan penting dalam demokrasi deliberatif ini, maka terdapat alasan kuat apabila pasar seharusnya juga memberikan perhatian terhadap program-program dari media massa yang berkenaan dengan masalah-masalah publik dan jurnalisme serius. Ketimbang menggulingkan pasar dan komersialisme, kalangan penganut demokrasi liberal deliberatif memiliki perhatian terhadap pemberian hak insentif-insentif melalui reformasi kerangka hukum yang diterapkan bagi media dan membantu perkembangan upaya-upaya independen yang terdapat dalam masyarakat sipil. Kalangan penganut demokrasi ini menolak jika negara tidak melakukan intervensi kepada pasar karena campur tangan negara justru menjadi hal yang vital untuk pertumbuhan yang sehat bagi pihak pasar itu sendiri. Apabila demokrasi tidak sekadar berkepentingan dengan agregasi preferensi-preferensi rakyat pada hari pemilihan umum, melainkan juga proses-proses komunikatif yang tertuju pada keputusan-keputusan yang diambil para pemilih dan wakil-wakil mereka, maka kebijakan komunikasi menjadi bagian integral bagi sehatnya demokrasi.

Prasyarat demokrasi, pentingnya komunikasi

Model demokrasi manakah yang sekarang ini terjadi dalam perpolitikan kita? Harus dikatakan secara terbuka bahwa kita berada dalam "jebakan" model demokrasi minimalis. Semua persoalan politik diserahkan kepada mekanisme pasar. Partai-partai politik berperan layaknya pada pedagang yang menawarkan aneka ragam komoditas politik, sementara itu rakyat ditempatkan sebagai pembeli yang hanya mampu beraksi ketika hari pemilihan umum terjadi. Kenyataan seperti ini juga terjadi dalam domain komunikasi ketika media massa diatur sepenuhnya oleh mekanisme penawaran-permintaan yang secara totaliter dikendalikan pasar.

Bukan fenomena yang mengejutkan apabila media massa tidak mempedulikan kepentingan publik karena kalangan pemain pasar media lebih menitikberatkan kepada peningkatan dan akumulasi keuntungan finansial belaka. Pasar media yang dibiarkan berkeliaran pada akhirnya hanya menyajikan berbagai program yang sarat dengan sensasionalisme, seperti misalnya sinetron, *infotainment*, *reality show*, berita-berita kriminalitas, atau acara-acara lain yang menjadikan publik makin mengalami pembodohan secara kronis. Komunikasi yang terjadi pun tidak sehat karena kalangan elite politik lebih banyak menggunakan media massa sebagai mesin propaganda, dan bukan sebagai sarana

dialog yang bermakna dan terbuka. Komunikasi pada model demokrasi kita yang berlangsung pada saat ini lebih banyak menyajikan manipulasi simbolik ketimbang memberikan perhatian pada persoalan-persoalan publik.

Dalam situasi semacam ini diperlukan langkah yang tegas untuk memperkuat komunitas politik yang dapat ditentukan dalam empat dimensi, yakni keanggotaan, komunikasi, agregasi kepentingan, dan budaya (Klein, 2001). Boleh dikatakan keempat dimensi ini menjadi prasyarat demokrasi yang sehat. Apabila diuraikan lebih lanjut, maka apa yang disebut sebagai keanggotaan adalah siapa yang diperbolehkan memberikan suara, terutama dalam ajang pemilihan umum. Komunikasi merujuk pada komunitas komunikasi karena demokrasi merupakan bentuk komunikasi yang intensif terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat kolektif. Komunikasi dalam kaitan ini dipandang sebagai kemampuan para anggota komunitas dalam menerima informasi yang sehat (misalnya tentang persoalan-persoalan publik), mentransmisikan pesan-pesan atau informasi (misalnya mengekspresikan pemikiran dan pendapat rakyat), dan secara kolektif memproses informasi (misalnya saja rakyat terlibat dalam diskusi dan proses-proses deliberatif). Komunikasi di sini mengandaikan adanya bahasa bersama, media yang tersebar luas, dan forum-forum yang dapat diakses oleh rakyat.

Sementara itu apa yang dinamakan agregasi kepentingan adalah keterlibatan partai politik dalam mendidik para pemilih, memformulasikan pandangan-pandangan kolektif, dan mengagresikan kepentingan dari sejumlah individu. Sedangkan dimensi kultural dapat merujuk pada identitas kolektif yang memainkan peran penting dalam demokrasi. Dalam lingkup ini bukan berarti identitas mayoritas diperbolehkan untuk menyingkirkan identitas kelompok minoritas. Dengan demikian, terciptanya jalinan kepercayaan (*mutual trust*), solidaritas, dan rasa hormat terhadap pihak-pihak lain harus diwujudkan untuk mengambil keputusan politik secara efektif.

Tanpa mengabaikan tiga dimensi lain yang berperan kuat dalam menciptakan demokrasi yang sehat, komunikasi menjadi problem yang penting dalam lingkup ini. Sebabnya adalah komunikasi dapat menjadi faktor yang menentukan dalam segitiga perdamaian-demokrasi-pembangunan. Komunikasi dalam persoalan ini harus terarah pada pihak media massa karena kekuatan media berperan sangat dominan dalam mencapai demokrasi. Terdapat tiga pendekatan yang dapat

diterapkan, sebagaimana dikemukakan Shinar (2007), yakni:

- (1) etis-normatif yang berarti bahwa organisasi-organisasi dan kalangan profesional media mampu merumuskan apa yang benar dan salah serta apa yang selayaknya disajikan dalam kinerja mereka sehari-hari;
- (2) pendekatan profesional yang bermakna bahwa harus muncul solusi terhadap berbagai problem serta dilema yang dihadapi organisasi-organisasi media dan para profesional ketika menjalankan aktivitas, seperti kontrol, kebebasan dalam berekspresi, pertanggungjawaban, akurasi, ketidakberpihakan, kepentingan publik, etika personal, hambatan-hambatan yang mempengaruhi liputan jurnalistik, serta peningkatan ketrampilan dalam bentuk, teknik penilaian, dan penilaian kritis serta berbagai kontradiksi yang terdapat dalam struktur media serta orientasi komunikasi kepada pembangunan atau pun perdamaian; dan
- (3) pendekatan struktural yang merujuk pada gejala kepemilikan media yang berimbang pada kepentingan negara atau swasta di mana hal ini berinteraksi dengan standar-standar dan etika profesional media, nilai-nilai demokratis, perkembangan sosial-ekonomi, serta nilai-nilai kebudayaan.

PENUTUP

Menjadi sedemikian jelas bahwa organisasi-organisasi media massa dan para profesionalnya menjadi pihak yang memegang peranan vital dalam komunikasi yang terjadi pada proses demokratisasi. Media tidak sekadar menyajikan berbagai program yang dianggap mampu mendatangkan iklan. Media menjadi sarana yang penting bagi berlangsungnya komunikasi antara elite politik dan rakyat. Media dapat berkedudukan sebagai pihak penengah yang memungkinkan para partisipan komunikasi dapat mengirimkan dan menerima pesan. Namun, ketika peran sebagai penengah itu tidak berjalan secara baik, misalnya saja karena organisasi-organisasi media dan para profesionalnya justru menunjukkan sikap partisan dalam pemberitaan mengenai kontestasi pada ajang pemilihan umum, maka berbagai informasi yang disajikan tidak lagi memberikan pengetahuan yang mencerahkan bagi publik, melainkan penuh distorsi dan manipulasi. Itulah komunikasi yang justru mengacaukan proses-proses demokratisasi.

Konklusi yang dapat diambil adalah komunikasi memang berperan kuat dalam proses demokratisasi. Namun, realitas yang tidak dapat dihindarkan adalah demokrasi dan proses-proses demokratisasi yang terdapat di dalamnya juga menentukan arah komunikasi itu sendiri. persoalannya adalah kita semua yang harus menentukan pilihan, yakni apakah demokrasi minimalis yang menempatkan pasar sebagai agen tunggal yang menentukan komunikasi, ataukah demokrasi radikal ataukah demokrasi deliberatif yang menjadi tujuan kita dalam melakukan komunikasi politik. Sekali lagi, komunikasi dan demokrasi memang saling memberikan pengandaian. Tetapi, agaknya model demokrasi tertentu (minimalis, radikal, atau deliberatif) yang justru pada realitasnya memiliki kekuatan yang berlebih untuk mendeterminasikan arah serta proses komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiske, John, *Introduction to Communication Studies*. London dan New York. Routledge, 1990.
- Klein, Hans, "The Feasibility of Global Democracy", *Camford* Volume 3 Number 4, August 2001.
- Lukmantoro, Triyono, "Maraknya Iklan-Iklan Politik", *Suara Merdeka*, 29 Mei 2008 (a).
- _____, "Watak Narsistis Iklan-Iklan Politik", *Bisnis Indonesia*, 1 September 2008 (b).
- _____, "Demokrasi dalam Rezim Uang", *Suara Merdeka*, 21 Maret 2009.
- Shinar, Dov, "Development, Democracy, Peace and Communication: An Overview of their Roles and Interaction" *GMJ: Mediterranean Edition* 2 (1) Spring 2007.
- Starr, Paul, "Democratic Theory and the History of Communications", dalam Barbie Zelizer (ed.), *Exploration in Communications and History*. London dan New York. Routledge, 2008.
- Young, Sally, "Democracy, Communication and Money", 2003. http://democratic.audit.anu.edu.au/papers/20031119_young_money.pdf
- Zank, Michael, "Martin Buber", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2007. <http://plato.stanford.edu/entries/buber/>